

**DAMPAK DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KIAMA KECAMATAN MELONGUANE
KABUPATEN TALAUD**

(Studi: Desa Kiama Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud)

Jefi B. Apena¹, Ita Pingkan F. Rorong², Krest D.Tolosang³

^{1,2,3}*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*

Email : jefibrianapena@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Dana Desa yang dianggarkan setiap desa dapat melakukan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga desa dapat tumbuh menjadi desa yang unggul, maju, dan mandiri. Adanya Alokasi Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di desa kiama, kecamatan melonguane, kabupaten kepulauan talaud dan untuk mengetahui seberapa besar pendapatan desa dalam mengelola dana desa dan alokasi dana desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan data sekunder dan primer dari tahun 2016 - 2021 di desa kiama, kecamatan melonguane, kabupaten kepulauan talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan di desa kiama, sedangkan Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan di desa kiama.

Kata kunci: Dana Desa; Alokasi Dana Desa; Kesejahteraan Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

Village development is a subject of development, and as a community movement in carrying out development based on awareness to improve a better life. It is known that almost all indonesians live in rural areas. The Village Fund budgeted by each village can carry out village development and empower village communities so that the village can grow into a superior, developed, and independent village. The existence of the Village Fund Allocation must provide the greatest benefit by prioritizing development activities and empowerment of village communities that are urgent to be implemented. This study aims to determine the impact of village funds and village fund allocations on the level of community welfare in kiama village, melonguane district, talaud islands district and to find out how much village income is in managing village funds and village fund allocations. The type of research used is descriptive quantitative and qualitative, using secondary and primary data from 2016 - 2021 in kiama village, melonguane district, talaud islands district. The results showed that the Village Fund had a positive and significant effect on the level of welfare in kiama village, while the Village Fund Allocation had a negative and insignificant effect on the level of welfare in kiama village.

Keyword: Village Fund; Village Fund Allocation; Community Welfare; Community Empowerment.

1. PENDAHULUAN

Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasinya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama dipedesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Young dan Quinn mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat (Anasiru, 2011). Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota untuk desa yang 2 dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Dana desa (DD) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa yang dianggarkan dalam apbn diharapkan setiap desa dapat melakukan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga desa dapat tumbuh menjadi desa yang unggul, maju, dan mandiri. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro, 2014). Hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

- 1) Peningkatan dan pemerataan distribusi kebutuhan pokok, seperti makanan, rumah, kesehatan, dan perlindungan;
- 2) Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang baik, peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan Skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial yang lebih baik (Stevensen, 2018).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kehidupan yang layak bagi warga negara agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik (Nazila, 2018). Tingkat kesejahteraan masyarakat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi apabila tingkat kesejahteraan meningkat, maka keberhasilan pembangunan ekonomi juga semakin baik dan sebaliknya kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjadi apabila keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin (2012), kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan kehidupan manusia yang dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut penelitian Mamonto (2020), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu (Huda 2021). Kebijakan juga sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa definisi mengenai kebijakan memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan (Thoha, 2017). Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih di pahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada proses hasil yang dibuat. Pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan (Eko, 2014). Alokasi Dana Desa adalah dana yang

diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat (Poernomo, 2020). Kondisi kemiskinan suatu negara mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk yang menempati negara tersebut, di mana semakin menurunnya tingkat kemiskinan suatu negara semakin meningkat tingkat kesejahteraan penduduknya, begitupun sebaliknya (Christianto, 2013). Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya Papua (Riani, 2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa provinsi Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah diantaranya hasil perikanan, perkebunan, kehutanan dan lain- lain serta memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya, pemanfaatan sumber daya alam tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut Arjuna (2019) pengaruh dana desa terhadap pendapatan masyarakat di kabupaten kepulauan talaud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana desa terhadap pendapatan masyarakat di kabupaten kepulauan talaud. Dana desa memberikan kedudukan yang sangat strategis bagi desa, dengan adanya dana desa pemerintah desa di tuntut untuk mengelola keuangan desa dengan bijak sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan masyarakat desa dan mengurangi tingkat kemiskinan serta dapat meningkatkan pendapatan di desa.

Menurut Indriyani,(2021) dengan penelitian berjudul efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten sangihe (studi kasus kecamatan tamako). Dana desa memberikan kedudukan yang sangat strategis bagi desa, dengan adanya adanya dana desa pemerintah desa di tuntut untuk mengelola keuangan desa dengan bijak sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peranan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan tamako kabupaten kepulauan sangihe yang dilihat dari sisi pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan koesioner dengan menggunakan analisis efektivitas untuk melihat penggunaan dari Dana Desa sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa diatas 100% yang artinya penggunaan dana desa di kecamatan tamako sangat efektif.

Menurut Mamonto,(2020) Pengaruh alokasi dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota bolaang mongondow raya tahun 2015-2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota bolaang mongondow raya tahun 2015-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota bolaang mongondow raya, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Bolaang Mongondow Raya.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan kantor badan pusat statistik Kabupaten Talaud, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Talaud, kantor Desa Kiama Kecamatan Melonguane. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari bulan Februari sampai dengan April.

Data dan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa apbdes tahun 2016 - 2021 atas dasar pendapatan asli desa, pendapatan transfer atau pengeluaran desa/belanja desa.

jenis data yang digunakan adalah:

- Data kualitatif, yaitu semua data atau informasi dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kuesioner dan lisan dengan mewawancarai langsung kemasayarakat umum.
- Data kuantitatif merupakan semua data atau informasi yang sifatnya terukur atau dapat dibahasakan dengan angka-angka.

Data sekunder ini di peroleh dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Talaud, kantor desa kiama, maredaren kiama, dan kiama barat. Adapun instansi yang di kunjungi untuk pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Talaud.

Metode Pengumpulan Data

- Penelitian Lapangan, yaitu dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari instansi yang menjadi sumber data dengan teknik observasi dan wawancara dengan menggunakan kusioner.
- Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang tidak langsung pada objek penelitian dan dilakukan dengan membaca buku, laporan dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai literatur dan referensi, termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Metode Pengambilan Sampel

Secara sederhana bisa dikatakan, bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut (Yusuf, 2016). Pada sampel random setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, dan diambil secara random. Memakai sampel secara random pada penelitian kuantitatif berarti peneliti berupaya buat meminimalisir kesalahan karena faktor keletihan serta kebosanan, mengurangi bias dari manusia dengan memakai mekanisme yang benar serta teknik yang tepat dan menyampaikan peluang kepada seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Abdul, 2017).

Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan Rumus *Slovin* untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan. Rumus *Slovin* adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Adapun rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N e^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditelorir atau diinginkan, misalnya 2%.

Dengan rumus diatas, maka jumlah sampel yang ditentukan sebanyak:

$$\begin{aligned} n &= \frac{1597}{1+1597 (0,1^2)} \\ &= \frac{1597}{1+1597(0,01)} \\ &= \frac{1597}{1+15,97} \\ &= \frac{1597}{16,97} \\ n &= 94,10724 \end{aligned}$$

Dari jumlah penduduk di desa kiama kecamatan melonguane sebanyak 1597 jiwa yang terdiri dari beberapa dusun. Berdasarkan rumus slovin dengan derajat kepercayaan 90%, tingkat kesalahan *Margin Of Error* yang ditetapkan adalah 10% atau 0,1. Maka didapatkan sampel sebanyak 94,10724, apabila dibulatkan sebanyak 95 sampel. Akan tetapi peneliti menjadikan sampel sebanyak 100. Jadi sampel yang akan digunakan dari populasi tersebut sebanyak 100 responden. Berdasarkan dari rumus slovin peneliti juga menggunakan teknik cluster sampling. Cluster sampling adalah dimana tiap-tiap unit dikumpulkan sebagai satu kumpulan atau kelompok. Dengan memperhatikan kondisi wilayah, peneliti mengelompokkan populasi penelitian dalam tiga cluster area/pekerjaan, yaitu pekerja kasar (Petani/nelayan), pegawai pemerintahan (aparatur desa), dan pekerja lainnya. Jadi penelitian ini menggunakan sampel cluster sampling, cara-cara untuk menentukan sampel adalah :

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan biaya.
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak data.
- c. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti.

Maka dalam hal ini peneliti mengambil sebagian sampel dari populasi, yaitu sebagian masyarakat Desa Kiama Kecamatan Melonguane berdasarkan cluster area/pekerjaan. Jadi keseluruhan sampelnya berjumlah 100 responden.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dana desa (dd) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat sangat memberikan manfaat dan masyarakat dapat merasakan dampak secara langsung masyarakat merasakan berbagai dampak positif membantu masyarakat di desa kiama, maredaren kiama, kiama barat kecamatan melonguane kabupaten talaud seperti jalan tani, drainase dan lain sebagainya. Tujuan penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa kiama, maredaren kiama, kiama barat memajukan perekonomian masyarakat dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan infrastruktur. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang 2 dibagikan secara proporsional, sebagai berikut:

- Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan alokasi dana desa (ADD) di desa kiama kecamatan melonguane kabupaten kepulauan talaud.
- Dana Desa (DD) yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%.

Tingkat Kesejahteraan masyarakat (TKM).

Variable dependen atau variable terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas (Darmawan, 2014). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat (Y) merupakan suatu kondisi yang menunjukkan ukuran tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang pangan, murahness biaya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera (Mildawati, 2019). Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat di Desa Kiama Kecamatan Melonguane dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut

Wahidahwati (2018) indikator kesejahteraan masyarakat yaitu (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perekonomian. Berdasarkan indikator diatas, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) keadilan ekonomi, (2) keadilan social, (3) keadilan demokrasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis kualitatif merupakan kajian yang menggunakan data-data teks, persepsi, dan bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak terukur dengan pasti (*intangibile*). Analisis data secara kualitatif bersifat hasil temuan secara mendalam melalui pendekatan bukan angka atau nonstatistik Sidanta (2022). Jadi penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan *absolut* untuk mengolah dan menganalisis data. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif dapat lebih bisa menemukan kenyataan kenyataan jamak yang terdapat pada data. Kedua, analisis induktif lebih bisa membuat hubungan peneliti koresponden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat atau tidaknya pengalihan suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pegasus bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian dan pembahasan

Dari jumlah penduduk di Desa Kiama Kecamatan Melonguane sebanyak 1597 jiwa yang terdiri dari beberapa dusun. Berdasarkan rumus slovin dengan derajat kepercayaan 90%, tingkat kesalahan *margin of error* yang ditetapkan adalah 10% atau 0,1. Sampel yang didapatkan sebanyak 94,10724 yang apabila dibulatkan sebanyak 95 sampel. Akan tetapi peneliti menjadikan sampel sebanyak 100.

Tabel 1. Rincian Anggran Dana Desa Untuk Setiap Bidang Desa kiama (2016-2021)

Tahun	Penyelenggaraan pemerintah	Pelaksanaan pembangunan	Pembinaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat
2016	220.949.400,00	357.541.400,00	239.478.300,00	
2017	229.652.825,00	452.703.000,00	217.666.473,00	
2018	305.030.270,00	497.437.527,00	20.000.000,00	247.729.000,00
2019	429.611.310,00	494.592.471,00	38.866.516,00	316.348.700,00
2020	367.546.524,00	296.991.000,00	12.095.787,00	167.000.000,00
2021	359.711.251,00	494.592.471,00	12.095.787,00	167.000.000,00
Total	1.552.790.329,00	2.099.265.398,00	528.107.076,00	898.077.700,00

Sumber: APBDS 2016-2021

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Total Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Kiama, untuk tahun 2016-2021 adalah sebesar Rp 4,266,647,000 yang penggunaannya dialokasikan ke 4(empat) bidang diantaranya: Bidang penyelenggaraan pemerintahan dialokasikan Dana sebesar Rp 1.552.790.329,00, untuk bidang pembangunan desa sebesar Rp 2.099.265.398,00, untuk bidang pembinaan masyarakat dialokasikan sebesar Rp 528.107.076,00, bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebesar Rp 898.077.700,00 Khusus di bidang pembangunan desa mendapat porsi

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang lebih besar yaitu Rp2.099.265.398,00. dari jumlah keseluruhan Dana Desa yang dikelola.

Tabel 2. Rincian Anggaran Dana Desa Untuk Setiap Bidang Desa Marewaren kiamo (2016-2021)

Tahun	Penyelenggaraan pemerintah	Pelaksanaan pembangunan	Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan masyarakat	Keadaan mendesak
2016	204.372.400,00	512.519.750,00	155.140.750,00		
2017	235.749.552,00	489.356.900,00	304.963.100,00		
2018	334.560.600,00	330.949.254,00	553.833.146,00		318.678.600,00
2019	455.217.907,00	694.638.450,00	200.232.800,00	15.000.000,00	
2020	446.294.806,00	1.012.413.300,00	262.690.150,00		
2021	391.496.615,00	918.959.000,00	600.417.000,00	35.000.000,00	
Total	2.067.691.880,00	3.958.836.654,00	2.077.276.946,00	50.000.000,00	318.678.600,00

Sumber: APBDS 2016-2021

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa total anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang diterima oleh desa marewaren kiamo, untuk tahun 2016-2021 dana desa adalah sebesar 5.054.138.000 dan alokasi dana desa sebesar 1.922.368.778 yang penggunaannya diakolasikan ke 5(lima) bidang diantaranya: bidang penyelenggaraan pemerintahan dialokasikan dana sebesar 2.067.691.880,00, untuk bidang pembangunan desa sebesar 3.958.836.654,00, untuk bidang pembinaan masyarakat dialokasikan sebesar 528.107.076,00, bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebesar 898.077.700,00 khusus di bidang pembangunan desa mendapat porsi dana desa dan alokasi dana desa yang lebih besar yaitu 3.958.836.654,00. dari jumlah keseluruhan dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola.

Tabel 3. Rincian Anggaran Dana Desa Untuk Setiap Bidang Desa kiamo Barat (2016-2021)

Tahun	Penyelenggaraan pemerintah	Pelaksanaan pembangunan	Pemberdayaan Pemerintah	Pembinaan masyarakat	Keadaan mendesak
2016	201.189.600,00	324.521.213,00	275.362.587,00		
2017	242.331.270,00	479.382.500,00	250.386.500,00		
2018	316.877.912,00	314.181.000,00	425.252.000,00		
2019	399.595.332,00	895.837.670,00	165.684.478,00		11.162.500,00
2020	399.292.192,00	736.565.055,25	66.199.095,75	3.500.000,00	558.345.151,00
2021	408.147.751,00	283.284.000,00	104.550.000,00	11.000.000,00	438.574.000,00
Total	1.967.434.057,00	3.033.771.438,25	1.287.434.660,75	14.500.000,00	1.008.081.651,00

Sumber : APBDS 2016-2021

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa total anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang diterima oleh desa kiamo barat, untuk tahun 2016-2021 dana desa adalah sebesar 4.408.037.000 dan alokasi dana desa sebesar 1.922.368.778 yang penggunaannya diakolasikan ke 5 (lima) bidang diantaranya: bidang penyelenggaraan pemerintahan dialokasikan dana sebesar rp 1.967.434.057,00 , untuk bidang pembangunan desa sebesar 3.033.771.438,25 untuk bidang pembinaan masyarakat dialokasikan sebesar 14.500.000,00, bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebesar di bidang keadaan mendesak desa sebesar 1.008.081.651,00 khusus di bidang pembangunan desa mendapat porsi dana desa dan alokasi dana desa yang lebih besar yaitu 3.033.771.438,25 dari jumlah keseluruhan dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola.

Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik

Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa kiamo, marewaren kiamo, kiamo barat kecamatan melonguane kabupaten kepulauan talaud merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemantauan dan pengawasan pembangunan serta pelaporan hasil pembangunan. Penggunaan dana desa ini digunakan untuk pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

peningkatan kualitas hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kiama dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

1. Tahap Perencanaan Pembangunan

Tahap perencanaan pembangunan di desa kiama di mulai dari pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dimana RPJM Desa memuat rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian dibuat kembali Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD di mulai dengan diadakannya musyawarah dusun (musdus) pada tiap-tiap dusun di desa kiama kemudian hasil yang di dapatkan dari musyawarah dusun (musdus) tersebut di musyawarah kembali di musyawarah desa (musdes), setelah seluruh usulan pembangunan desa telah rampung dikumpulkan maka dibuatlah daftar usulan RKPD yang akan dibahas kembali di musyawaran perencanaan pembangunan (musrembang) dikecamatan.

2. Tahap pelaksanaan Pembangunan

Berpedoman pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 yang terdiri dari 7 kegiatan pembangunan fisik tersebut diatas, maka diketahui bahwa terdapat 1 kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran add dan juga 1 kegiatan yang didanai oleh silpa/sisa lebih anggaran pendapatan desa tahun 2020 yang dianggarkan kembali pada tahun 2021.pembangunan desa yang didanai oleh dana desa tahun anggaran 2017 berjumlah 11 kegiatan dan dilakukan dengan 2 kali tahapan pelaksanaan yaitu tahap i (pertama) dan tahap ii (kedua) selama tahun 2021.

3. Tahap Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan

Tahap pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kiama tidak akan berjalan baik tanpa adanya pengawasan dari pemerintah desa. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak dari luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti: tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat keamanan setempat sangat diperlukan. seperti yang tertuang pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 68 yang menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan serta melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (bpd). Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa itu sendiri sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahap perencanaan pembangunan desa dan tahap pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan pada tahapan perencanaan di lakukan dengan cara : menilai usulan RPJMDes dan RKPD, kemudian pemantauan pada tahap pelaksanaan di lakukan dengan cara menilai, antara lain : pengadaan barang/jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa harus dilakukan secara cermat dalam setiap proses dan tahapan sesuai dengan rencana pembangunan pedesaan yang telah di tetapkan.Masyarakat dapat melakukan pengawasan sebagai bentuk peran aktif untuk membantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya.

4. Tahap Pelaporan Hasil Pembangunan dan pemberdayaan

Pelaporan hasil pembangunan dan pemberdayaan di desa kiama dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang di kerjakan oleh pemerintah desa kiama itu sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga yang bukan dari pihak pemerintah desa kiama. Tahap pelaporan ini dilakukan dengan cara Kepala Desa Kiama menyampaikan laporan kepada bupati talaud melalui camat melonguane yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan apbdesa semester pertama dan semester akhir. laporan pertanggungjawaban realisasi dana desa atas pelaksanaan pembangunan yang dimuat dalam apbdesa disampaikan oleh pemerintah desa kiama pada akhir tahun berkenaan yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah desa atas dana desa dan alokasi dana desa yang dikelolanya terdapat baliho laporan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2021 di depan kantor Desa Kiama. Hasil

penelitian terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kiama diperoleh melalui wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang selanjutnya diambil untuk menentukan perbandingan jumlah target anggaran dana desa dan realisasi anggaran alokasi dana desa.

Tabel 4. Laporan Realisasi Pembangunan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Kiama

No	Uraian	Anggaran/ Target	Anggaran Rea lisasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	100	Dana desa
2.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	82.000.000,00	82.000.000,00	100	Dana desa
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif)	5.000.000,00	5.000.000,00	100	Dana desa
4.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	48.900.000,00	48.900.000,00	100	Dana desa
5.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	133.348.000,00	133.348.000,00	100	Dana desa
6.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	47.000.000,00	47.000.000,00	100	Dana desa
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif	97.562.500,00	97.562.500,00	100	Dana desa
8.	Pengadaan Drainase	92.697.175,00	92.697.175,00	100	Dana desa
9.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	82.000.000,00	82.000.000,00	100	Dana desa
10.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	94.015.437,00	94.015.437,00	100	Dana desa
11.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	6.587.684,00	6.587.684,00	100	Dana desa
12.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	133.369.799,00	133.369.799,00	100	SILPA
13.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	47.000.000,00	47.000.000,00	100	Dana desa
14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif	97.562.500,00	97.562.500,00	100	Dana desa
15.	Pengadaan Drainase	92.697.175,00	92.697.175,00	100	Dana desa
16.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	82.000.000,00	82.000.000,00	100	Dana desa
	Total	1.145.740.270		100	DD/ADD

Sumber: APBDS 2016-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2016-2021 di desa kiama, maredaren kiama, kiama barat mencapai angka 100% untuk semua jenis kegiatan pembangunan fisik maupun pemberdayaan desa. Sesuai hasil ini menunjukkan bahwa dana desa dan alokasi dana desa yang di alokasikan untuk semua kegiatan pembangunan fisik maupun pemberdayaan di desa kiama sudah dikelola secara efektif karena semua hasil mencapai angka 100%.

4.2. Pembahasan

1. Dampak Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan masyarakat Di Desa Kiama.

Hasil penelitian diatas mengindikasikan bahwa dana desa telah berjalan sesuai dengan tujuan. Pelaksanaan program dana desa di desa kiama sudah dijalankan sesuai prioritas penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa yaitu untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan. Sebagian besar dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan desa melalui program padat karya yaitu seperti membangun infrastruktur desa, karena padat karya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa, sebab pembangunan infrastruktur desa akan memberdayakan sumber daya manusia lokal desa, sumber daya alam masing-masing desa, menggunakan bahan-bahan baku dari desa, sehingga dana desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan manfaat dana desa pun bisa dirasakan semua masyarakat di kiama kecamatan melonguane Kabupaten Talaud. Hasil penelitian ini sudah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam penelitian (Ritonga, 2021) yang meneliti pengaruh dana desa dan penanggulangan kemiskinan, menyatakan bahwa dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. Tujuan program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

1. Dampak alokasi dana desa terhadap tingkat kesejahteraan di desa kiama kecamatan melonguane Kabupaten Talaud.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa cara pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui kebijakan alokasi dana desa yang digelontorkan pemerintah belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan penelitian diatas hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peraturan pemerintah dalam negeri nomor 37 tahun 2007 dalam penelitian (Astuti, 2013) yang meneliti pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan, menyatakan bahwa alokasi dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa.

2. Dampak secara bersamaan dana desa dan jumlah alokasi dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di desa kiama kecamatan melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berdasarkan Hasil penelitian diatas berarti variabel dana desa dan alokasi dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kiama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 bahwa secara garis besar tujuan dari kebijakan dana desa dan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Nilam Indah Susilowati 2017) yang meneliti pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa alokasi dana desa, dana desa, belanja modal dan produk domestik regional bruto secara bersama-sama berpengaruh terhadap angka kemiskinan.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai dampak dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Kiama Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dana desa berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin meningkat dana desa, maka semakin meningkat tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Alokasi dana desa berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin meningkat alokasi dana desa, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan mengalami kenaikan.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Kiama Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud.
4. Dana desa diharapkan akan semakin meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan terciptanya keadilan serta pemerataan pembangunan dalam hal ini sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajibannya sebagai warga negara.
5. Agar permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat di desa Kiama bisa teratasi dan peran pemerintah desa dalam memberikan kebijakan sangat diperlukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasiru, R. (2011). Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Astuti, P. B. (2013). Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2).
- Badrudin, R. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Christianto, T. (2013). Determinan dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku. *Volume VII, 2. Jurnal Ekonomi Cita Ekonomika*.
- Darmawan, A. (2014). Politik Hukum Penguatan Desentralisasi Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., & Qomariyah, P. (2014). Desa membangun indonesia. *FPPD. Yogyakarta*.
- Huda, M. F. (2021). Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan *George C Edward III*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Latif, A., Yusuf, A. M., & Efendi, Z. M. (2017). Hubungan Perencanaan Karier dan Efikasi Diri dengan Kesipan Kerja Mahasiswa. *Konselor*, 6(1), 29–38.
- Mamonto, C., Rotinsulu, T. O., & Tolosang, K. D. (2020). PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA BOLAANG MONGONDOW RAYA TAHUN 2015-2018. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).
- NAZILA, N. R. (2018). Pengaruh Pemberian Insentif Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Pada PT. Indojava Agrinusa Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pangke, I. N. P., Kumenaung, A. G., & Tumilaar, R. L. H. (2021). EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SANGIHE (STUDI KASUSKECAMATAN TAMAKO). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Pinilas, A., Kumenaung, A. G., & Rorong, I. P. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pendapatan

- Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03).
- Poernomo, V. W. (2020). *PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)(Studi kasus di desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Riani, I. A. P., & Pudjihardjo, M. (2012). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap PendapatanPerkapita, Kemiskinan, Dan Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Papua. *Jurnal Bumi Lestari*, 12(1), 137–148.
- Ritonga, A., Handra, H., & Andrianus, F. (2021). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Sumatera Barat. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 277–290.
- Sari, A. N., & Wahidahwati, W. (2018). PENGARUH PENGGUNAAN ADD, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(5).
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Sidanta, K., Christian, B., Hadi, H., Angelia, W., & Istijanto, I. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Konsumen Milenial pada E-Commerce Di Indonesia. *Indonesian Business Review*, 5(2), 156–173.
- Stevensen, R. Y. (2018). Efektivitas Dana Desa (DD) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pineleg Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Keuangan Daerah*, 19(6), 1–18.
- Thoha, M. (2017). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana. PT Adhitya Andrebina Agung.
- Yusuf, A. M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenada Media.